



Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang)

Mailyn Herman *, M.Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi politik para penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2024 di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket atau kuesioner dengan subjek penelitian sebanyak 91 orang penyandang disabilitas khususnya Fisik yang di uji menggunakan statistik deskriptif dan uji Korelasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2024 di Kota Padang menggunakan teori Almond (dalam Andriyus, 2013) dan undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, menunjukkan bahwa partisipasi tertinggi ditemukan pada kategori voting sebesar 66,62%, yang tergolong tinggi. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden masih aktif dalam kegiatan pemungutan suara. Namun, partisipasi dalam kegiatan politik lainnya seperti diskusi politik (33,28%), menghadiri dan mengikuti kampanye (29,94%), relawan (1,64%), menjadi saksi dalam pemilu (1,09%), menjadi anggota KPPS (6,59%), dan menjadi pengawas pemilu (2,19%) berada pada tingkat yang rendah. Secara keseluruhan, persentase partisipasi di seluruh kategori mencapai 21,1%, yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi dalam voting cukup tinggi, keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam aktivitas politik lainnya masih sangat minim. Selain dari itu terlihat bahwasanya terdapat korelasi pada kategori lemah antara jenis kelamin terhadap partisipasi politik penyandang Disabilitas tahun 2024 di Kota Padang. Pada katregori pendidikan terdapat korelasi pada kategori sedang antara Tingkat Pendidikan terhadap partisipasi politik penyandang Disabilitas tahun 2024 di Kota Padang.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Penyandang Disabilitas

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1821>

*Correspondence: Mailyn

Email: mailynherman@gmail.com

Received: 11-06-2024

Accepted: 15-06-2024

Published: 25-06-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study is motivated by the low political participation of people with disabilities in Padang City. The research aims to analyze the political participation of people with disabilities in the 2024 general election in Padang City. A quantitative approach with a descriptive method was used in this study. Data collection was conducted through the distribution of questionnaires to 91 physically disabled individuals, who served as the research subjects. The data were analyzed using descriptive statistics and correlation tests. The results show that the political participation of people with disabilities in the 2024 general election in Padang City, based on Almond's theory (in Andriyus, 2013) and the Election Law Number 7 of 2017, indicates that the highest participation was found in the voting category, with a percentage of 66.62%, which is considered high. This suggests that the majority of respondents are still actively engaged in voting activities. However, participation in other political activities, such as political discussions (33.28%), attending and following campaigns (29.94%), volunteering (1.64%), serving as election witnesses (1.09%), being members of the KPPS (6.59%), and working as election supervisors (2.19%), remains at a low level. Overall, the participation percentage across all categories reaches 21.1%, which falls into the low category. This indicates that although voting participation is relatively high, the involvement of people with disabilities in other political activities is still very minimal. Additionally, it was observed that there is a weak

correlation between gender and political participation among people with disabilities in Padang City in 2024. In the education category, there is a moderate correlation between the level of education and political participation among people with disabilities in Padang City in 2024.

Keywords: Political Participation, Elections, Persons with Disabilities

Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan ciri utama yang membedakan demokrasi dengan sistem lainnya (Adnan et al., 2021), artinya partisipasi politik merupakan penopang atau pijakan utama sebuah negara dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik melibatkan berbagai aktivitas yang memungkinkan individu untuk mengembangkan, mengungkapkan, dan menyuarakan pandangan mereka mengenai kondisi dunia serta cara dunia tersebut diatur (Pangestu, Agustino, & Bintari, 2021). Melalui partisipasi ini, masyarakat tidak hanya mengekspresikan opini mereka tentang kebijakan dan isu-isu publik, tetapi juga berusaha untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka (Pangestu, Agustino, & ..., 2021). Partisipasi politik dikatakan mampu mempengaruhi sebuah tingkat maupun kualitas demokrasi di suatu negara. Seperti yang dijelaskan oleh Verba dan Nie dalam *Participation in America : Political Democracy and Sosial Equality* bahwa Semakin banyak individu yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, semakin tinggi kualitas dan tingkat demokrasi di suatu negara, sebaliknya jika semakin sedikit orang dalam pengambilan keputusan maka tingkat demokrasi dinyatakan semakin rendah (FATHONAH, 2021).

Setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk menggunakan hak suara pada saat pemilihan umum berlangsung (Harlan & Sholihah, 2024). Hak ini berlaku tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi kelompok masyarakat marginal dan individu dengan keterbatasan atau disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Penyandang Disabilitas secara jelas mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang setara untuk turut serta dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, partisipasi politik bagi penyandang disabilitas tidak seharusnya terbatas hanya pada penggunaan hak suara, melainkan juga meliputi keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan politik lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara penuh dalam kehidupan politik, memperkuat inklusi, dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek demokrasi (Rahmayani, 2023).

Meskipun setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, akses untuk mewujudkan hak tersebut tidak selalu mudah diperoleh oleh semua lapisan masyarakat (Ramadhan, 2021). Terutama bagi penyandang disabilitas, yang sering kali memerlukan aksesibilitas khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam setiap tahapan pemilu. Tantangan ini tidak hanya terbatas pada proses pemberian suara, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dari partisipasi politik, seperti mengikuti kegiatan kampanye, terlibat dalam pengawasan, atau berperan aktif dalam

pemantauan jalannya pemilu. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan fisik, sosial, dan teknis yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara setara dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan aksesibilitas atau peraturan terkait penggunaan hak suara yang menyulitkan mereka. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana yang diperlukan tersedia dan mudah diakses, guna mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses politik.

Pemberian ruang politik bagi para penyandang disabilitas sangat penting agar setiap dari mereka mampu menyalurkan dan menghargai hak-haknya dalam pemilu. Aksesibilitas dalam pemilihan umum dapat diartikan sebagai kemampuan atau kemudahan bagi individu untuk memperoleh layanan yang memadai dalam menjalankan hak pilih mereka. Hal ini mencakup segala upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pemilih, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara dan tidak mengalami hambatan dalam berpartisipasi dalam proses pemilu, termasuk dalam hal pemberian suara. Namun meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, hal tersebut tidak selalu memastikan bahwa akses tersebut dapat terwujud secara optimal. Kenyataan ini tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas jika dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencakup penyandang disabilitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun penyandang disabilitas telah terdaftar sebagai pemilih, banyak di antara mereka yang masih menghadapi hambatan signifikan dalam menyalurkan hak pilih mereka (Lengkoan et al., 2022).

Berdasarkan kondisi yang teramati dari pemilu tahun-tahun sebelumnya, permasalahan lain yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu (1) Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak KPU kepada penyandang disabilitas menyebabkan mereka kurang memahami proses pemilu. (2) Pemilih penyandang disabilitas tidak terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (3) Masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) (4) Penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya karena banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum menyediakan akses yang sesuai dengan kebutuhannya. (5) Ketersediaan surat dan alat bantu coblos yang belum memenuhi kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. (6) Di antara berbagai jenis disabilitas, disabilitas fisik menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 6.477 pemilih disabilitas dari total 10.437 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari jumlah tersebut, hanya 60,99% pemilih disabilitas yang menggunakan hak suara mereka. Di Kota

Padang, persentase pemilih disabilitas yang menggunakan hak suara mencapai 62% dari jumlah DPT. Angka ini masih jauh di bawah target rata-rata partisipasi politik nasional sebesar 77,5%. Terdapat 1.214 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT di Kota Padang, namun hanya 62% dari mereka, yaitu sekitar 762 jiwa yang menggunakan hak suaranya (PERMATA, 2023).

Dalam konteks permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas fisik pada Pemilu 2024 serta mengeksplorasi apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2023), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel tanpa mengaitkannya dengan variabel lain. Selain itu, metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara realistis, nyata, dan aktual dengan memberikan deskripsi sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Wiwik (2023) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu berdasarkan kenyataan dengan menarik kesimpulan dari fenomena yang diamati menggunakan statistika numerik.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Padang, khususnya di dua kecamatan, yaitu Koto Tangah dan Lubuk Begalung, dengan subjek penelitian sebanyak 91 responden penyandang disabilitas fisik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan terkait masalah yang diteliti untuk memperoleh informasi relevan. Teknik analisis data yang digunakan melibatkan jawaban responden melalui angket dengan dua skala pengukuran, yaitu skala Guttman dan skala Likert.

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson. Untuk mengetahui tingkat partisipasi penyandang disabilitas, kriteria interpretasi skor terkait tingkat capaian responden digunakan. Menurut Riduwan (2006), kriteria interpretasi skor untuk Tingkat Capaian Responden (TCR) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.Tingkat Capaian Responden

Kategori Jawaban	Rentang Nilai (%)
Sangat tinggi	81-100
Tinggi	61-80
Sedang	41-60
Rendah	21-40
Sangat Rendah	0-20

Sumber : Akdon & Ridwan (2006)

Selanjutnya, untuk menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas, digunakan uji Korelasi Pearson. Menurut Murni (2013), korelasi merupakan metode untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua atau lebih variabel yang berbeda, yang diukur melalui koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini menggambarkan seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel tersebut. Tingkat kerentanan hubungan tersebut dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini(Kasmawanto & Nurjannah, 2021):

Tabel 2. Interval Korelasi Person

Interval Koefisien	Keeratan Korelasi
0,00-0,20	Sangat Lemah
0,21-0,40	Lemah
0,41-0,70	Moderate/Sedang
0,71-0,90	Kuat
0,91-0,99	Sangat Kuat
1	Korelasi Sempurna

Sumber : Nugroho (2005)

Hasil dan Pembahasan

Menurut Gabriel Almond (2018), partisipasi konvensional diklasifikasikan sebagai kegiatan yang memiliki prosedur dan waktu yang jelas, serta diketahui oleh publik secara pasti, seperti memberikan suara (voting), yang merupakan hak dasar setiap warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil mereka (Alfred et al., 2018). Selain itu, partisipasi politik juga dapat diwujudkan melalui diskusi politik, di mana individu dapat berbagi pandangan dan pendapat tentang isu-isu politik yang sedang berkembang. Kegiatan kampanye merupakan sarana penting lainnya, di mana masyarakat dapat mendukung calon atau partai politik yang mereka yakini dapat mewakili kepentingan mereka. Tidak hanya itu, partisipasi politik juga mencakup pembentukan dan keikutsertaan dalam kelompok-kelompok kepentingan, yang bertujuan untuk memperjuangkan isu-isu tertentu yang dianggap penting oleh anggota kelompok tersebut(Haryani, 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilihan Umum juga menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat diwujudkan melalui peran sebagai saksi dalam pemilu, menjadi anggota KPPS, dan bertindak sebagai pengawas pemilu(Pangestu et al., 2020).

Partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang termasuk dalam kategori rendah. Penilaian ini didasarkan pada teori partisipasi politik Gabriel Almond (2018) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilihan Umum, yang mengidentifikasi tujuh kategori partisipasi politik masyarakat dan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. Data Tingkat Capaian Responder Kategori

No	Kategori	Rata-Rata	Kategori
1	<i>Voting</i>	66,62%	Tinggi
2	Diskusi Politik	33,28%	Rendah
3	Menghadiri dan Mengikuti Kampanye	29,94%	Rendah
4	Relawan	1,64%	Rendah
5	Menjadi Saksi dalam Pemilu	1,09%	Rendah
6	Menjadi Anggota KPPS	6,59%	Rendah
7	Menjadi Pengawas	2,19%	Rendah
Jumlah Rata-Rata		21,1%	Rendah

Sumber : Hasil olahan Data

a. *Voting*

Pada kategori *voting* atau pemberian hak suara, hasil menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian responden berada pada angka 66,62%, yang termasuk dalam kategori tinggi. Ini berarti bahwa partisipasi politik para penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang, khususnya dalam aspek *voting*, telah menunjukkan penggunaan hak suara mereka untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu (Mahmudah et al., 2020).

Penelitian ini konsisten dengan temuan Sastrawati (2019), yang menyatakan bahwa *voting* merupakan bentuk partisipasi paling dasar yang dilakukan masyarakat dalam pemilu. Setelah proses pemberian suara selesai, partisipasi politik biasanya langsung berhenti. Oleh karena itu, sudah sepatutnya aspek *voting* dalam partisipasi pemilu berada dalam kategori sedang (Sastrawati, 2020).

Kemudian, penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Artanti (2023) Partisipasi politik di Kabupaten Kudus selama Pilkada tahun 2018 mencapai angka yang mengesankan, yaitu 84,25%, yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam proses demokrasi. Namun meskipun mereka secara aktif menggunakan hak pilihnya, banyak dari mereka yang kurang terlibat dalam diskusi politik, tidak aktif menghadiri kampanye, dan jarang terlibat dalam kegiatan politik lainnya seperti menjadi relawan atau mengorganisir acara-acara politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kota Padang, khususnya pada aspek *voting*, berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas di Kota Padang pada tahun 2024 aktif

berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dengan memberikan suara mereka. *Voting*, yang merupakan tindakan partisipasi politik paling dasar dan mendasar, menjadi pilihan utama bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pemilihan umum. Partisipasi yang tinggi ini mengindikasikan bahwa meskipun *voting* berada pada tingkatan hierarki terendah dalam partisipasi politik, namun hal ini merupakan langkah penting bagi penyandang disabilitas untuk menyuarkan hak politik mereka. Dengan demikian, keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam *voting* menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, meskipun mungkin belum mencakup partisipasi politik yang lebih luas atau lebih intensif seperti advokasi atau keterlibatan dalam kampanye politik.

b. Diskusi Politik

Pada kategori diskusi politik, nilai rata-rata tingkat capaian responden berada pada kategori rendah, yaitu sebesar 33,28%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang dalam aspek diskusi politik masih rendah, dengan hanya sebagian kecil yang terlibat dalam diskusi politik. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya minat responden untuk berdiskusi politik, terutama di media sosial.

Penelitian ini sesuai dengan temuan, yang menyatakan bahwa dalam konteks politik, penggunaan media sosial telah mengubah dinamika komunikasi politik secara signifikan. Individu yang cenderung berdiskusi tentang politik biasanya aktif menggunakan media sosial, sehingga media sosial menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam politik, dengan akses yang lebih luas dan lebih tinggi bagi masyarakat (Salman Farid, 2023).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Musa Karim et al., 2020), mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, Gen-Z di Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat partisipasi politik yang masih rendah. Partisipasi politik mereka umumnya terbatas pada bentuk respons terhadap konten politik yang mereka temui di media sosial, serta kesadaran sukarela untuk mengikuti konten-konten politik tersebut. Meskipun mereka terlibat dalam mengikuti informasi dan perkembangan politik, keterlibatan mereka belum mencapai tahap di mana mereka aktif berbagi atau menyebarkan konten politik kepada orang lain (Dedi, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kota Padang berada pada kategori rendah. Hal ini mencerminkan minimnya keterlibatan aktif dari penyandang disabilitas dalam proses politik, terutama dalam hal berdiskusi mengenai perkembangan politik. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa minat responden dari kelompok disabilitas untuk terlibat dalam diskusi politik masih sangat terbatas, yang berdampak langsung pada rendahnya partisipasi mereka dalam pemilihan umum. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap informasi politik, kurangnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan politik, serta hambatan sosial dan fisik yang dihadapi oleh

penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong penyandang disabilitas di Kota Padang agar lebih aktif dalam meningkatkan partisipasi politik mereka, tidak hanya melalui pemberian suara tetapi juga dengan terlibat dalam diskusi-diskusi terkait informasi politik. Partisipasi dalam diskusi ini dapat membantu mereka lebih memahami isu-isu yang relevan, meningkatkan kesadaran politik, dan pada akhirnya memperkuat suara mereka dalam proses demokrasi. Dengan peningkatan keterlibatan dalam diskusi politik, diharapkan penyandang disabilitas dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam menentukan arah kebijakan dan pemerintahan di masa depan.

c. Menghadiri dan Mengikuti Kampanye

Pada kategori menghadiri dan mengikuti kampanye menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang termasuk dalam kategori rendah, dengan rata-rata tingkat capaian responden sebesar 29,94%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kota Padang tidak menghadiri atau mengikuti kampanye sebelum pemilihan umum.

Penelitian ini sesuai dengan temuan (Kariyani, 2023), yang menunjukkan bahwa hanya 41 dari 97 responden, atau sekitar 42,26%, yang menghadiri dan mengikuti kampanye. Beberapa faktor mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menghadiri dan mengikuti kampanye, salah satunya adalah faktor internal, yaitu kesadaran, kemauan, dan keinginan individu untuk terlibat dalam kampanye.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Padang dalam aspek menghadiri dan mengikuti kampanye berada pada kategori rendah dan hendaknya responden untuk meningkatkan kesadaran bagaimana pentingnya partisipasi responden dalam menghadiri dan mengikuti kampanye. Hal ini dapat mempengaruhi pengetahuan responden terkait informasi politik terbaru dan menjadi pertimbangan dalam pemilihan pemimpin kedepannya. Oleh karena itu aspek menghadiri dan mengikuti kampanye merupakan aspek yang penting dalam partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Padang.

d. Relawan

Hasil pengolahan data, tingkat capaian responden terkait partisipasi politik dalam aspek relawan berada pada kategori rendah dengan rata-rata tingkat capaian responden sebesar 1,64. Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam aspek relawan pada pemilihan umum di Kota Padang tahun 2024 masih rendah, dengan mayoritas responden tidak terlibat sebagai relawan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Anggraini, 2019), yang mengungkapkan bahwa 99% masyarakat tidak pernah menjadi relawan atau memberikan sumbangan

kepada kandidat dalam Pilkada serentak 2015. Ini berarti hanya 1% dari masyarakat yang bersedia menjadi relawan dalam partisipasi politik untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini termasuk kesadaran diri, kondisi sosial ekonomi, dan praktik politik uang.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kota Padang, khususnya dalam aspek keterlibatan sebagai relawan, masih sangat rendah. Hanya sebagian kecil responden yang bersedia untuk berperan sebagai relawan selama proses pemilihan umum berlangsung. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran diri yang rendah mengenai pentingnya peran relawan dalam proses demokrasi. Banyak penyandang disabilitas merasa bahwa kontribusi mereka sebagai relawan tidak signifikan atau bahkan merasa tidak mampu berpartisipasi karena keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan besar, di mana kondisi finansial yang kurang mendukung membuat banyak individu lebih memilih untuk fokus pada kebutuhan dasar mereka daripada terlibat dalam kegiatan relawan yang tidak memberikan imbalan langsung. Faktor sosial, seperti kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitas, juga menjadi penghalang, karena penyandang disabilitas sering kali tidak didorong atau bahkan diabaikan dalam konteks partisipasi politik. Faktor lingkungan juga turut memengaruhi, di mana fasilitas dan aksesibilitas yang kurang memadai membuat penyandang disabilitas enggan atau tidak mampu terlibat secara aktif sebagai relawan. Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sebagai relawan dalam pemilihan umum, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka, mengatasi hambatan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan inklusif.

e. Menjadi Saksi dalam Pemilu

Berdasarkan hasil pengolahan data, partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang dalam aspek menjadi saksi pemilu masih sangat rendah, dengan hampir semua responden tidak berpartisipasi sebagai saksi dalam pemilu. Rata-rata tingkat capaian responden sebesar 1,09, yang tergolong dalam kategori rendah, menunjukkan bahwa hampir semua responden tidak pernah menjadi saksi pemilu. Faktor utama yang berkontribusi terhadap hal ini adalah kurangnya penerapan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemilu, serta keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, yang menjadi hambatan bagi mereka untuk berperan sebagai saksi pemilu.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Arrivanissa, 2023), yang menyatakan bahwa 99% masyarakat tidak pernah menjadi relawan atau memberikan sumbangan kepada kandidat dalam Pilkada serentak 2015. Ini berarti hanya 1% masyarakat yang bersedia menjadi relawan dalam partisipasi politik untuk pelaksanaan Pilkada

serentak 2015. Faktor-faktor seperti kesadaran diri, kondisi sosial ekonomi, dan praktik politik uang memengaruhi rendahnya partisipasi ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang tergolong rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian dari KPU dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam partisipasi politik, terutama dalam peran sebagai saksi pemilu.

f. Menjadi Anggota KPPS

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang dalam aspek menjadi anggota KPPS termasuk dalam kategori rendah, dengan nilai rata-rata tingkat capaian responden sebesar 6,59%. Ini berarti bahwa sebagian besar penyandang disabilitas tidak berpartisipasi sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan pemilu. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi ini antara lain keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan kurangnya komunikasi antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh (Oktapiani et al., 2022a), yang mengungkapkan bahwa banyak penyandang disabilitas tidak diberikan kesempatan untuk berperan sebagai saksi dalam proses pemilu. Penelitian tersebut menunjukkan adanya pandangan yang keliru di masyarakat, yaitu anggapan bahwa tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas dianggap sebagai beban bagi perusahaan maupun penyelenggara pemilu. Pandangan semacam ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap kemampuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas dalam proses politik. Akibatnya, kesempatan bagi mereka untuk terlibat secara aktif dan setara dalam kegiatan politik, khususnya sebagai saksi dalam pemilu, menjadi sangat terbatas. Laporan ILO (2011) menyatakan bahwa mengabaikan potensi produktif penyandang disabilitas dapat menyebabkan kerugian sebesar 3 hingga 7 persen dalam produktivitas. Oleh karena itu, KPU diharapkan dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan potensi penyandang disabilitas dalam partisipasi politik, khususnya sebagai saksi dalam pemilu.

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015), yang menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang masih rendah, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam keterlibatan mereka dalam proses demokrasi yang penting ini. Partisipasi politik tidak hanya dilihat sebagai tindakan memberikan suara pada hari pemilihan, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh proses pemilu, termasuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu seperti KPPS.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang dalam aspek menjadi

anggota KPPS berada pada kategori rendah. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya komunikasi dan perhatian dari pihak penyelenggara KPU, yang mengakibatkan minimnya keterlibatan penyandang disabilitas sebagai anggota KPPS pada Pemilu 2024 di Kota Padang (Febriantanto, 2019).

g. Menjadi Pengawas

Dalam aspek menjadi pengawas pemilu, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas juga rendah, dengan nilai rata-rata capaian responden sebesar 2,19%. Ini berarti bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan selama pemilu masih sangat minim, yang dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran selama pemilu berlangsung.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Millah & Dewi, 2021), yang mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2019 terdapat 16.043 temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Data ini menunjukkan minimnya partisipasi politik masyarakat dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, KPU diharapkan dapat mengembangkan berbagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi politik, khususnya dalam aspek pengawasan.

Penelitian (Mais & Yaum, 2019), juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga kewajiban moral dan hukum bagi setiap warga negara yang peduli terhadap keberlangsungan demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemilu harus berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari kecurangan (Febriantanto, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kota Padang, khususnya dalam aspek keterlibatan sebagai pengawas pemilu, berada pada kategori yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari penyandang disabilitas yang terlibat secara aktif dalam peran penting tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memaksimalkan potensi penyandang disabilitas sebagai pengawas selama proses pemilu berlangsung (Oktapiani et al., 2022b).

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Padang.

a) Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai korelasi antara variabel jenis kelamin dan partisipasi politik penyandang disabilitas pada tahun 2024 di Kota Padang adalah 0,210. Nilai ini menunjukkan adanya korelasi yang rendah antara jenis kelamin dengan tingkat keterlibatan politik penyandang disabilitas. Dengan kata lain, perbedaan jenis kelamin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi politik penyandang

disabilitas di Kota Padang. Korelasi yang rendah ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi politik yang relatif sama, dan faktor jenis kelamin bukanlah determinan utama dalam tingkat keterlibatan mereka dalam proses politik. Oleh karena itu, faktor-faktor lain seperti aksesibilitas, kesadaran politik, atau dukungan sosial mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan perbedaan jenis kelamin.

Hasil uji korelasi variabel jenis kelamin dengan partisipasi politik penyandang disabilitas pada tahun 2024 di Kota Padang menunjukkan kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang tidak signifikan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga nilai korelasi berada pada kategori rendah. Penelitian ini sesuai dengan temuan (Nur Iqrima, Amrazi Zakso, 2019), yang menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki korelasi yang lemah terhadap partisipasi politik, dipengaruhi oleh perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang lemah antara jenis kelamin dan partisipasi politik penyandang disabilitas pada tahun 2024 di Kota Padang.

b) Pendidikan

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Penelitian ini menggunakan uji korelasi dengan aplikasi SPSS dan menemukan korelasi kategori sedang antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik penyandang disabilitas pada tahun 2024 di Kota Padang, dengan nilai korelasi sebesar 0,539. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keterlibatan politik, di mana individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam berpolitik.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Iqrima dkk (2019), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan erat dengan partisipasi politik. Pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang politik dan memunculkan minat serta pemikiran yang lebih bijak dalam berpolitik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kesadaran dan partisipasi politiknya.

Temuan ini juga sesuai dengan (Prakoso et al., 2024), yang menunjukkan bahwa di Desa Beran, mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan hingga lulusan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi politik. Tingginya jumlah penduduk dengan pendidikan menengah ke bawah menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi isu penting yang mempengaruhi partisipasi politik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik penyandang disabilitas pada tahun 2024 di Kota Padang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula partisipasinya dalam kegiatan politik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Padang pada tahun 2024 tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, baik itu dalam bentuk memberikan suara, menghadiri kampanye, maupun berpartisipasi dalam diskusi politik. Penelitian ini juga mengungkap adanya korelasi yang lemah antara jenis kelamin dengan partisipasi politik penyandang disabilitas, yang mengindikasikan bahwa faktor gender memiliki pengaruh terbatas terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam politik. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya korelasi yang sedang antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap partisipasi politik, di mana mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Padang, diperlukan upaya yang lebih terfokus pada peningkatan aksesibilitas dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. F., Dalle, J., Malau, H., & Yvanka, V. (2021). The Influence of social media and Public Policy on Public Political Participation in Handling COVID-19 Pandemic: A Study from Indonesian Domestic and Overseas Youngsters' Perspective. *Croatian International Relations Review*, 27(87), 133–159. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2021-0006>
- Alfred, K. J., Yurnie, S., & Tompodung, J. (2018). Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Distrik Ayamaru Kota. *Eksekutif*, 1 Nomor 1(1), 1–10.

- Anggraini, M. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015 diakses 28 juni 2022. *MENARA Ilmu*, 13(9), 72–85.
- Arrivanissa, D. S. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie*, 2(1), 39–58. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6080>
- Dedi, A. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3318>
- FATHONAH, W. (2021). STRATEGI RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN WALIKOTA repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/16761/>
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*. <https://journal.ugm.ac.id/polgov/article/view/48859>
- Harlan, D. A., & Sholihah, L. (2024). PERAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA JAMBI. *eprints.ipdn.ac.id*. <http://eprints.ipdn.ac.id/19468/>
- Haryani, R. (2023). PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017. *UNES Journal Of Swara Justisia*. <https://swarajustisia.unespadaang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/364>
- Kariyani, L. N. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Sumbawa Tahun 2020 Di Desa Leseng. *Proceeding Of Student Conference*, 1(5), 587–600.
- Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (2021). Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu* <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/view/2316>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024. *Riskesda* 2018, 3(8), 103–111.
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/37899>
- Mahmudah, U., Pramono, J., & ... (2020). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta. *Solidaritas: Jurnal Ilmu* <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5517>
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>

- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355–363. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>
- Musa Karim, A., Wibawa, A., & Toko Arisanto, P. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093>
- Nur Iqrima, Amrazi Zakso, S. (2019). Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Gubernur. *Proceedings International Conference on Teaching and Education (ICoTE)*, 2(2), 256–261.
- Oktapiani, N., Warjio, W., & Ginting, B. (2022a). Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019. *Perspektif*, 11(3), 1161–1172. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6465>
- Oktapiani, N., Warjio, W., & Ginting, B. (2022b). Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019. *PERSPEKTIF*. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/6465>
- Pangestu, A., Agustino, L., & ... (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal of ...*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2279363&val=14415&title=Faktor-faktor%20yang%20Mempengaruhi%20Partisipasi%20Politik%20Penyandang%20Disabilitas%20Sebagai%20Calon%20Anggota%20Legislatif%20Pada%20Pemilu%20Tahun%202019>
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2020). ... PPUA Disabilitas Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 (Studi Tentang Pencalonan Penyandang Disabilitas *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*. <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/6682>
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2021). Peran Ppua Disabilitas Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019. *Kata Pengantar*. https://library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnalndanbuku/Jurnal_Bawaslu_DKI_Desember_2020.pdf#page=145
- PERMATA, F. A. (2023). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. *etd.ummy.ac.id*. <https://etd.ummy.ac.id/id/eprint/39708/>
- Prakoso, B., Himmah, R., & Illahi, F. K. (2024). *Jurnal Lanskap Politik* *Jurnal Lanskap Politik*. *Lanskap Politik*, 1(September 2023), 107–133.
- Rahmayani, E. (2023). Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. *Indonesian Journal of Political Studies*. <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/IJPS/article/view/509>
- Ramadhan, M. N. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal*

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

<http://journal.bawaslu.go.id/index.php/GBK/article/view/255>

Salman Farid, A. (2023). Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik Dan Persepsi Publik. QAULAN Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 4(1), 45–50.

Sastrawati, N. (2020). Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 19(2), 187. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>